



PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2008

- ☑ Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang.
- ☑ Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang
- ☑ Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.
- ☑ Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2008, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,07 persen.
- ☑ Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, mie instan, telur, tempe dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
- ☑ Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia, 1996-2007

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena adanya

kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
menurut Daerah, 1996-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2. Perkembangan Penduduk Miskin Maret 2007-Maret 2008

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang (Tabel 2).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.

Tabel 2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2008

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2007	132 259	55 683	187 942	13,56	12,52
Maret 2008	143 897	60 999	204 896	12,77	11,65
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2007	116 265	30 572	146 837	23,61	20,37
Maret 2008	127 207	34 624	161 831	22,19	18,93
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2007	123 993	42 704	166 697	37,17	16,58
Maret 2008	135 270	47 366	182 636	34,96	15,42

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2007-Maret 2008. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, inflasi umum relatif stabil selama periode Maret 2007-Maret 2008. Laju inflasi umum “*year-on-year*” (Maret 2008 terhadap Maret 2007) sebesar 8,17 persen.

Kedua, komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Rata-rata harga beras nasional selama periode Maret 2007-Maret 2008 turun -3,01 persen, yaitu dari Rp.6.414,- per kg pada Maret 2007 menjadi Rp. 6.221,- per kg pada Maret 2008. Penurunan harga beras ini berbanding terbalik dengan inflasi *year-on-year* periode yang sama sebesar 8,17 persen.

Ketiga, sekitar 70 persen penduduk miskin di daerah perdesaan bekerja di sektor pertanian. Kondisi pekerja di sektor pertanian pada bulan Maret 2008 relatif baik. Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani selama periode bulan Maret 2007-Maret 2008 meningkat 9,88 persen, naik dari Rp.14.932,- pada Maret 2007 menjadi Rp.16.407,- pada Maret 2008. Pada periode yang sama, rata-rata upah riil harian buruh tani juga mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari Rp.2.553,- pada Maret 2007 menjadi Rp.2.576,- pada Maret 2008. Artinya, daya beli buruh tani relatif sedikit membaik. Selama Subround I (Januari-April) 2008 juga terjadi panen raya. Produksi padi Subround I-2008 naik 5,55 juta ton (sekitar 24,86 persen) dari produksi padi Subround I-2007, yaitu dari 22,31 juta ton GKG pada Subround I-2007 menjadi 27,86 juta ton GKG pada Subround I-2008 (hasil Angka Ramalan II 2008).

Keempat, selama periode Februari 2007-Februari 2008 jumlah penganggur berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen (10,55 juta orang), tetapi turun menjadi 8,46 persen (9,43 juta) pada Februari 2008. Turunnya pengangguran ini karena terbukanya lapangan kerja di sektor informal secara luas sehingga membuka kemungkinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dari angka kemiskinan Maret 2008 menurut provinsi (Tabel 4), terdapat sembilan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dua

provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar pada Maret 2008 adalah Papua (37,08 persen) dan Papua Barat (35,12 persen).

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2007-Maret 2008

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2007-Maret 2008, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,56 persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2007, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,38 persen dan pada bulan Maret 2008 peranannya hampir sama yaitu 74,07 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 38,97 persen di perdesaan dan 28,06 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (4,18 persen di perdesaan, 3,10 persen di perkotaan), mie instan (2,82 persen di perdesaan, 3,39 persen di perkotaan), telur (2,43 persen di perdesaan, 3,38 persen di perkotaan), tempe (2,14 persen di perdesaan, 2,56 persen di perkotaan) dan tahu (1,65 persen di perdesaan, 2,27 persen di perkotaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,99 pada Maret 2007 menjadi 2,77 pada Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,84 menjadi 0,76 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di
Indonesia menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2008

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2007	2,15	3,78	2,99
Maret 2008	2,07	3,42	2,77
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2007	0,57	1,09	0,84
Maret 2008	0,56	0,95	0,76

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 2,07 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,42. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan hanya 0,56 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,95. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada daerah perkotaan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index* (persentase penduduk miskin terhadap total penduduk), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan menurut provinsi. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2008 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2008. Jumlah sampel sekitar 68.000 RT sehingga data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Tabel 4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Provinsi Maret 2007-2008

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)						% Penduduk Miskin					
		Kota		Desa		K+D		Kota		Desa		K+D	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	NAD	218,8	195,8	864,9	763,9	1 083,7	959,7	18,68	16,67	29,87	26,30	26,65	23,53
12	Sumatera Utara	833,5	761,7	935,0	852,1	1 768,5	1 613,8	14,21	12,85	13,63	12,29	13,90	12,55
13	Sumatera Barat	149,2	127,3	380,0	349,9	529,2	477,2	9,78	8,30	13,01	11,91	11,90	10,67
14	Riau	246,4	245,1	328,1	321,6	574,5	566,7	9,53	9,12	12,90	12,16	11,20	10,63
15	Jambi	137,2	120,1	144,7	140,2	281,9	260,3	15,42	13,28	7,81	7,43	10,27	9,32
16	Sumatera Selatan	545,9	514,7	785,9	734,9	1 331,8	1 249,6	20,30	18,87	18,43	17,01	19,15	17,73
17	Bengkulu	135,6	131,8	235,0	220,2	370,6	352,0	23,00	21,95	21,66	19,93	22,13	20,64
18	Lampung	366,0	365,6	1 295,7	1 226,0	1 661,7	1 591,6	18,11	17,85	23,70	22,14	22,19	20,98
19	Bangka Belitung	38,6	36,5	56,5	50,2	95,1	86,7	8,09	7,57	10,87	9,52	9,54	8,58
21	Kepulauan Riau	76,8	69,2	71,6	67,1	148,4	136,4	10,08	8,81	10,54	9,60	10,30	9,18
31	DKI Jakarta	405,7	379,6	-	-	405,7	379,6	4,61	4,29	-	-	4,61	4,29
32	Jawa Barat	2 654,6	2 617,4	2 803,3	2 705,0	5 457,9	5 322,4	11,21	10,88	16,88	16,05	13,55	13,01
33	Jawa Tengah	2 687,3	2 556,5	3 869,9	3 633,1	6 557,2	6 189,6	17,23	16,34	23,45	21,96	20,43	19,23
34	DI Yogyakarta	335,3	324,2	298,2	292,1	633,5	616,3	15,63	14,99	25,03	24,32	18,99	18,32
35	Jawa Timur	2 575,7	2 310,6	4 579,6	4 340,6	7 155,3	6 651,3	14,71	13,15	25,02	23,64	19,98	18,51
36	Banten	399,4	371,0	486,8	445,7	886,2	816,7	6,79	6,15	12,52	11,18	9,07	8,15
51	Bali	119,8	115,1	109,3	100,7	229,1	215,7	6,01	5,70	7,47	6,81	6,63	6,17
52	NTB	570,9	560,4	547,7	520,2	1 118,6	1 080,6	30,44	29,47	21,06	19,73	24,99	23,81
53	NTT	124,9	119,3	1 038,7	979,1	1 163,6	1 098,3	16,41	15,50	29,95	27,88	27,51	25,65
61	Kalimantan Barat	144,1	127,5	440,2	381,3	584,3	508,8	11,45	9,98	13,47	11,49	12,91	11,07
62	Kalimantan Tengah	51,2	45,3	159,1	154,6	210,3	200,0	6,72	5,81	10,76	10,20	9,38	8,71
63	Kalimantan Selatan	83,1	81,1	150,4	137,8	233,5	218,9	6,01	5,79	7,72	6,97	7,01	6,48
64	Kalimantan Timur	136,1	110,4	188,7	176,1	324,8	286,4	7,44	5,89	16,98	15,47	11,04	9,51
71	Sulawesi Utara	79,0	72,7	171,1	150,9	250,1	223,5	8,31	7,56	13,80	12,04	11,42	10,10
72	Sulawesi Tengah	67,1	60,9	490,3	463,8	557,4	524,7	12,86	11,47	24,97	23,22	22,42	20,75
73	Sulawesi Selatan	152,8	150,8	930,6	880,9	1 083,4	1 031,7	6,18	6,05	17,87	16,79	14,11	13,34
74	Sulawesi Tenggara	31,3	27,2	434,1	408,7	465,4	435,9	6,24	5,29	25,84	23,78	21,33	19,53
75	Gorontalo	30,7	27,5	211,2	194,1	241,9	221,6	11,08	9,87	34,76	31,72	27,35	24,88
76	Sulawesi Barat	55,1	48,3	134,8	122,8	189,9	171,1	16,53	14,14	20,29	18,03	19,03	16,73
81	Maluku	49,1	44,7	355,6	346,7	404,7	391,3	14,49	12,97	37,02	35,56	31,14	29,66
82	Maluku Utara	11,7	9,0	98,2	96,0	109,9	105,1	4,29	3,27	15,22	14,67	11,97	11,28
91	Papua Barat	11,0	9,5	255,8	237,0	266,8	246,5	7,14	5,93	48,82	43,74	39,31	35,12
94	Papua	35,4	31,6	758,0	701,5	793,4	733,1	7,97	7,02	50,47	45,96	40,78	37,08
	INDONESIA	13 559,3	12 768,5	23 609,0	22 194,8	37 168,3	34 963,3	12,52	11,65	20,37	18,93	16,58	15,42